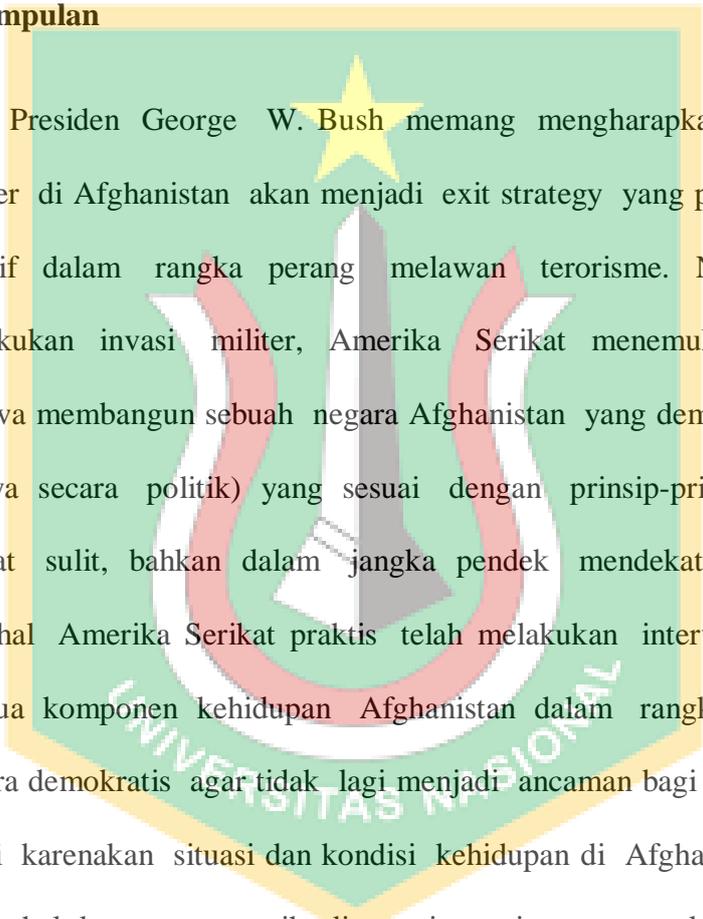


## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan



Presiden George W. Bush memang mengharapkan bahwa invasi militer di Afghanistan akan menjadi exit strategy yang paling tepat dan efektif dalam rangka perang melawan terorisme. Namun, setelah melakukan invasi militer, Amerika Serikat menemukan kenyataan bahwa membangun sebuah negara Afghanistan yang demokratis (bahkan hanya secara politik) yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi sangat sulit, bahkan dalam jangka pendek mendekati kemustahilan. Padahal Amerika Serikat praktis telah melakukan intervensi di hampir semua komponen kehidupan Afghanistan dalam rangka mewujudkan negara demokratis agar tidak lagi menjadi ancaman bagi negaranya. Hal ini di karenakan situasi dan kondisi kehidupan di Afghanistan, terutama dalam hal keamanan, masih diwarnai persaingan antar kelompok, ambisi pribadi para warlord, perebutan kekuasaan lokal, dan perpecahan etnis serta agama di antara rakyat Afghanistan sendiri.

Walaupun Amerika Serikat sudah memulai perang melawan terorisme, Afghanistan masih menghadapi banyak masalah. Di antara masalah-masalah tersebut, beberapa yang paling serius adalah: pertama,

Taliban dan al-Qaeda belum terkalahkan. Mereka hanya terpecah belah dan mencari kesempatan untuk membalas tindakan Amerika Serikat. Kedua, pemerintah transisional Afghanistan terlalu menggantungkan diri pada bantuan asing dalam segala hal, baik ekonomi, politik, maupun militer, sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari rakyat Afghanistan. Jika kedua masalah besar ini tidak dapat diselesaikan, keamanan dan stabilitas di Afghanistan tidak dapat terjamin.

Selain itu, sistem kemasyarakatan Afghanistan yang telah terintegrasi dengan kuat dalam diri rakyat Afghanistan serta adanya kekuatan militer dari kelompok-kelompok (milisi) lokal, sangat sulit juga untuk mengharapkan Afghanistan akan mampu mewujudkan negara dengan sistem demokrasi ala Barat. Sistem terbaik, yang paling mendekati demokrasi, yang dapat dicapai adalah suatu bentuk proses tawar-menawar antara kelompok-kelompok yang bersitegang untuk berbagi kekuasaan dengan memberikan otonomi kepada satu sama lain. Dengan demikian, yang masih mungkin dilakukan Amerika Serikat adalah mencegah Afghanistan kembali menjadi negara yang dijadikan markas kelompok ekstrim Islam.

Demokratisasi di Afghanistan dilakukan dalam berbagai tahapan seperti, liberalisasi yang dilakukan ketika Amerika Serikat melakukan invasi militer ke Afghanistan, yang ditujukan untuk membebaskan rakyat

Afghanistan yang dianggap terkekang selama masa pemerintahan Taliban menuju rakyat demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan, hak sipil, dan hak politik. Selanjutnya dalam tahap transisi, Amerika Serikat memiliki peran besar di mana sebagian besar konvensi dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan merupakan dorongan dan didanai Amerika Serikat. Sementara dalam instalasi pemerintahan, Amerika Serikat berhasil dalam hal mendukung pembentukan rezim baru dalam pemilihan umum, namun dapat dikatakan gagal karena pemerintah hasil pemilihan umum tidak kuat. Kegagalan pemerintah pusat Afghanistan yang didukung Amerika Serikat tidak memungkinkan Afghanistan melangkah lebih jauh menuju konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, peran Amerika Serikat dalam demokratisasi di Afghanistan dapat dikatakan hanya berhasil pada tahap pengenalan demokrasi kepada rakyat Afghanistan. Setelah Hamid Karzai terpilih menjadi presiden Afghanistan melalui pemilihan umum Oktober 2020.

Proses demokrasi pun mengalami nasib yang tidak terlalu jauh. Secara historis, Afghanistan tidak pernah menganut demokrasi yang ingin dibentuk Amerika Serikat. Selain itu, meskipun pemilihan umum presiden berhasil diselenggarakan pada awal Oktober 2020, banyak yang tidak mengindahkan terpilihnya Hamid Karzai sebagai presiden pilihan rakyat Afghanistan. Para warlord masih menerapkan kekuasaan mereka di wilayah masing-masing dengan peraturan dan hukum yang mereka tetapkan sendiri. Di samping itu, meskipun terdapat niat untuk

mendorong kemandirian pemerintah pusat Afghanistan, aktor-aktor internasional, terutama Amerika Serikat, masih memimpin pengimplementasian program-program pemerintah Afghanistan. Hal ini menjadikan demokratisasi di Afghanistan sebagai sebuah proses yang semu.

Melihat karakter Afghanistan yang unik, memang akan sangat sulit untuk melakukan proses demokrasi yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan nasional Amerika Serikat. Afghanistan tidak pernah memiliki basis demokrasi sehingga rezim politik demokratis yang kuat dan stabil akan sangat sulit terbentuk jika tidak merangkul para pemuka masyarakat di Afghanistan. Selain itu, proses demokrasi yang diharapkan menjadi pendukung utama terciptanya kehidupan demokratis di Afghanistan tidak akan terwujud selama Afghanistan masih dihadapi dengan masalah trauma dan dendam perang sipil antar faksi, perekonomian yang didominasi oleh perdagangan opium, antagonisme antar kelompok etnis, tidak kuatnya institusi, dan partai politik. Kondisi-kondisi ini menjadi hambatan utama bagi Amerika Serikat yang bertujuan menjadikan Afghanistan menuju negara yang demokratis. Secara keseluruhan inti temuan skripsi ini bahwa dengan kompleksitas kehidupan di Afghanistan, terutama dalam politik, Amerika Serikat berhasil memperkenalkan demokrasi politik kepada Afghanistan, namun belum berhasil menerapkan kehidupan berdemokrasi.

Dengan melihat kondisi Afghanistan di mana pemerintahan baru didukung oleh Amerika Serikat ternyata tidak mampu mendapatkan dukungan dari rakyatnya, dapat dikatakan bahwa setidaknya untuk masa depan jangka pendek, masih akan sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk berhasil menerapkan demokrasi yang sesuai keinginannya. Hal ini mustahil tercapai apabila Presiden Karzai tidak berhasil menjalankan pemerintahan demokratis yang memiliki pengaruh kuat di seluruh wilayah Afghanistan. Tugas berat yang harus dilakukan untuk menyukseskan demokratisasi ala Amerika Serikat adalah bagi Presiden Karzai untuk dapat mengendalikan atau setidaknya berkompromi dengan para penguasa wilayah dan warlord serta mencegah kekuatan Taliban dan al-Qaeda di Afghanistan untuk tidak berkembang secepat dulu. Tindakan inipun belum tentu disetujui oleh seluruh rakyat Afghanistan, yang berarti prospek demokrasi seperti diinginkan Amerika Serikat belum jelas. Kedudukan Presiden Karzai yang lemah di negaranya sendiri bahkan dapat jatuh apabila Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari Afghanistan dalam waktu dekat. Apabila Presiden Karzai jatuh sebuah konflik baru di Afghanistan sangat mungkin terjadi.

Dari data penilaian diatas, Demokratisasi yang terjadi di Afghanistan merupakan salah satu strategi halus yang dilakukan Amerika Serikat dalam mengontrol negara periferi afghanistan untuk tetap dapat menguasai tanpa peperangan fisik. Walaupun telah diketahui Amerika selalu ingin mencampuri urusan politik negara-negara berkembang

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebaiknya untuk peneliti selanjutnya lebih menekankan pada model demokrasi yang cocok diterapkan di afghanistan guna mendapat gambaran sepenuhnya korelasi antara jenis politik dengan sistem pemerintahanya, dari sistem demokrasi presidnesial terpusat menjadi sistem parlemen yang sederhana dalam masa transisi dilihat dari identifikasi permasalahan yang muncul di masyarakat. Selain itu studi komparasi mendalam keberhasilan demokratisasi negara lain diperlukan agar dapat dengan mudah mengukur serta membandingkan keberhasilan upaya demokratisasi di afghanistan.

